

KESIAPAN IMPLEMENTASI CALON DAERAH OTONOMI BARU (CDOB) WILAYAH BAGIAN TIMUR KABUPATEN KARAWANG

Nurkinan,.,Drs.,.M.M.

Universitas Singaperbangsa Karawang
nourkinan_ckp@yahoo.com

ABSTRAK

Percepatan pembentukan Kota Cikampek menjadi langkah strategis dan realistis untuk mendekatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat. Selain itu, sangat penting untuk pemerataan pembangunan di Wilayah Timur Kabupaten Karawang ini. Rencana pemekaran Cikampek itu muncul sejak 1992, karena adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur dan jauhnya jarak dengan ibu kota kabupaten. Di sektor ekonomi saat ini pertumbuhan cukup tinggi. Tiga kriteria yang ditentukan Pemerintah pusat, yaitu sektor pembangunan, sektor pemerintahan, dan sektor ekonomi untuk kesejahteraan rakyat sudah cukup memenuhi tiga kriteria yang telah ditentukan menjadi Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB).

Kata Kunci : Pemerataan Pembangunan, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.

A. PENDAHULUAN

Penataan Daerah utamanya Pemekaran Daerah ditujukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional dan daerah, serta memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah.

Karena itulah, dengan adanya perencanaan usulan penataan daerah utamanya pemekarandaerah, Komite I DPD RI menyatakan, penataan daerah utamanya hak rakyat dan daerah untuk mendapatkan kesejahteraannya yang dijamin oleh UUD 1945 (Pembukaan, Pasal 18, 18A dan Pasal 18B), yang selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (BAB VI tentang Penataan Daerah Pasal 31 sampai dengan Pasal 56).

Dengan adanya perencanaan usulan penataan daerah utamanya pemekaran daerah, DPD RI memiliki komitmen, menyatakan, dan mendorong serta mengawasi sejumlah usulan atau pembentukan DOB. Dewan Perwakilan Daerah beberapa waktu lalu merilis daftar, 173 calon daerah otonom baru yang diusulkan.

Dari jumlah tersebut, ternyata 18 daerah di antaranya berada di Jawa Barat, termasuk Provinsi Cirebon dan Parahyangan. Berdasarkan daftar itu, 18 calon daerah otonom baru yang berada di Jawa Barat antara lain:

1. Provinsi Cirebon (mencakup Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, Kota Cirebon),
2. Provinsi Parahyangan (Kabupaten/Kota Tasikmalaya, Garut, Ciamis, Pangandaran),

3. Kabupaten Tasikmalaya Selatan,
4. Kabupaten Tasikmalaya Utara,
5. Kabupaten Cianjur Selatan,
6. Kota Cianjur/Cipanas,
7. Kabupaten Cirebon Timur,
8. Kabupaten Indramayu Barat,
9. Kota Kertajati,
10. Kota Cikampek,
11. Kabupaten Karawang Timur,
12. Kota Jatinangor,
13. Kota Cikarang,
14. Kabupaten Bandung Timur,
15. Kabupaten Bogor Barat,
16. Kabupaten Sukabumi Utara,
17. Kabupaten Garut Selatan,
18. Kabupaten Garut Utara.

Ketua Komite I DPD Akhmad Muqowam mengatakan, DPD hanya akan menindaklanjuti secara serius usulan daerah otonom baru yang secara resmi dan legal beroleh respons dari pemerintah daerah induk. Menurut dia, hingga kini, usulan pembentukan Provinsi Parahyangan dan Provinsi Cirebon belum memiliki aspek legalitas, baik dari Gubernur maupun DPRD Jawa Barat. Hingga kini, dari Jawa Barat, baru usulan untuk tiga calon daerah otonom baru yang sudah berproses, yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, dan Kabupaten Garut Selatan. Bahkan, DPD sudah menyampaikan pandangan terhadap usulan pembentukan ketiga daerah otonom baru tersebut.

Meskipun demikian, dia mengatakan, usulan-usulan dari masyarakat tetap akan ditampung oleh DPD. Hal itu termasuk usulan pembentukan Provinsi Cirebon dan Provinsi Parahyangan yang hingga kini baru berupa aspirasi dari elemen masyarakat. Oleh karena itu, DPD tetap akan memasukkan usulan tersebut ke dalam daftar usulan pembentukan Daerah Otonom Baru.

"Kami, salah bila usulan itu tidak dimasukkan, apalagi kalau sudah ada aspirasi masyarakat," tuturnya, Rabu, lalu.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP Desain Besar Penataan Daerah (Desartada) kini hampir rampung. Sehari sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyatakan, kemajuan penyelesaian kedua RPP sudah mencapai 95%. Menurut Akhmad, setiap aspirasi usulan pembentukan daerah otonom baru (DOB) baru akan menemukan penentuannya setelah RPP Desartada rampung. Sejumlah penilaian dan persyaratan akan dilalui agar usulan DOB dapat disetujui..

B. RUMUSAN MASALAH

Peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesiapan implementasi aparatur pemerintah kecamatan yang menjadi calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Wilayah Bagian Timur Kabupaten Karawang.

2. Bagaimana kesiapan Forum Koordinasi Daerah Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek
3. Bagaimana kesiapan masyarakat yang berada di enam kecamatan (Kecamatan Purwasari, Cikampek, Kota Baru, Tirtamulya, Jatisari dan Kecamatan Banyusari),

C. METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam mendapatkan data, melakukan wawancara langsung dengan aparat enam kecamatan yang termasuk CDOB, anggota Forum Koordinasi Daerah Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek serta beberapa tokoh masyarakat di enam kecamatan tersebut.

b. Target Penelitian

Target dari penelitian yaitu untuk mengetahui kesiapan Implementasi CDOB Wilayah Bagian Timur Kabupaten Karawang dalam percepatan pembentukan Daerah Otonomi Baru Kota Cikampek. Dalam memperoleh subjek penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung kepada pihak yang terkait.

c. Prosedur Penelitian

Prosedur yang pertama peneliti lakukan dalam mendapatkan data yaitu berkunjung ke aparat Kecamatan Purwasari, Cikampek, Tirtamulya, Kota Baru, Jatisari dan Kecamatan Banyusari, anggota Forum Daerah Percepatan Pembentukan DOB serta tokoh masyarakat di enam kecamatan tersebut.

d. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2011:224) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Sugiyono juga menjelaskan bahwa pada penelitian kualitatif, pengumpulan data tidak dipandu oleh teori namun oleh fakta-fakta di lapangan, sehingga analisis yang dilakukan bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dan kemudian dapat dikonstruksikan menjadi hipotesis atau teori. Penelitian ini menggunakan 3 cara atau teknik dalam pengumpulan data yaitu:

1) Observasi

Kartono (1980: 142) observasi adalah studi yang disengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

2) Wawancara

Menurut Satori Djam'an (2013:130) wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

3) Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif menurut Satori Djam'an (2013:149) merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Studi dokumentasi adalah mengumpulkan dokumen dan data-data yang

diperlukan dalam permasalahan penelitian lalu ditelaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.

4) Studi Kepustakaan

Menurut Sugiyono, studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti, selain itu studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini dikarenakan penelitian tidak akan lepas dari literatur-literatur Ilmiah (Sugiyono, 2012:291).

e. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif ,dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu .miles dan huberman (1984) ,mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh . aktivitas dalam analisis data , yaitu *data reduction* , *data display* , dan *conclusion drawing / verivication* (Sugiyono , 2012: 246)

1) *Data reduction* (reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak , untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, seperti telah dikemukakan semakin lama peneliti ke lapangan , maka jumlah data akan semakin banyak , kompleks dan rumit .

2) *Data display* (penyajian data)

Setelah data direduksi , maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori , *flowchart* dan sejenisnya.

3) *Conclusion drawing / verification*

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi . kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Akan tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Data yang diperoleh menjabarkan mengenai kesiapan implemmentasi CDOB Wilayah Karawang bagian Timur.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Menurut Budi Winarno, pengertian implementasi adalah tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh sekelompok individu yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Nurdin Usman berpendapat bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (1979), pengertian implementasi adalah pemahaman yang akan terjadi setelah menetapkan suatu program yang menjadi fokus perhatian

pemerintah yang merancang implementasi kebijakan. Dikatakan juga bahwa Implementasi merupakan kejadian yang terjadi setelah dibuat dan disahkan pedoman kebijakan negara.

Menurut Friedrich, Implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan pengertian dari beberapa tokoh diatas, implementasi adalah pelaksanaan kegiatan berdasar pada kebijakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok atau pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu.

Dengan demikian makna kesiapan implementasi yang dimaksudkan dalam pembahasan ini yaitu kesiapan pelaksanaan kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Wilayah Bagian Timur Karawang.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa kesiapan implementasi aparatur pemerintah kecamatan yang menjadi calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Wilayah Bagian Timur Kabupaten Karawang sebagai berikut:

1. Aparatur Kecamatan Purwasari, Cikampek, Tirtamulya, Kota Baru, Jatisari dan Banyusari, menyatakan kesiapannya melaksanakan tugas apabila daerahnya dijadikan salah satu daerah yang masuk CDOB.
2. Cikampek kehidupan ekonominya sehat dan bagus. Pusat perekonomian Cikampek berada di sektor perdagangan. Selain itu juga terdapat dua kawasan industri PT Pupuk Kujang dan PT Indotasei.
3. Kesiapan Forum Koordinasi Daerah Panitia Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Cikampek.

“ berdasarkan proses perencanaan CDOB Kota Cikampek ini sudah muncul sejak 1980 an, namun masyarakat di Wilayah Cikampek hanya bisa berbicara saja tanpa bisa melakukan aksi nyata untuk merealisasikannya, Masyarakat merasa kurang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten. Sehingga muncul keinginan – keinginan untuk memisahkan diri dengan Kabupaten Karawang menjadi Kota Cikampek. Baik secara ekonomi ataupun perencanaan CDOB Kota Cikampek sudah sangat siap hanya tinggal menunggu persetujuan Pemkab Karawang dan Surat Keputusan (SK) Daerah Otonomi Baru dari Presiden RI.” ungkap Dr. H. Nandang Saefudin Zenju, Drs. M.M, dari Tim Percepatan Pembentukan DO Kota Cikampek.

4. Kesiapan masyarakat yang berada di enam kecamatan (Kecamatan Purwasari, Cikampek, Kota Baru ,Tirtamulya, Jatisari dan Kecamatan Banyusari),

“ Bila benar menjadi DOB, Cikampek, harus dibenahi seperti infrastrukrnya, aspek ekonomi, sumber daya manusianya dan juga agar diperhatikan oleh pemerintah, Cikampek harus mempunyai perguruan tinggi, sekolah yang layak, transfortasi yang aman dan nyaman. Rencana DOB Kota Cikampek, muncul karena adanya ketimpangan pembangunan infrastukturnya dan jauh jaraknya dengan ibu kota kabupaten ke Wilayah Cikampek,” ungkap Haryanto tokoh masyarakat.

2. SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Untuk kesiapan Implementasi CDOB Wilayah Karawang Bagian Timur, aparaturnya kecamatan yang tercatat sebagai daerah yang masuk wilayah DOB, menyatakan siap mendukung sampai terlaksananya Kota Cikampek, begitu juga Forum Daerah Percepatan Pembentukan DOB serta tokoh masyarakat di enam kecamatan tersebut.

SARAN

Pihak Tim Percepatan Pembentukan DOB, agar menyiapkan sumber daya manusia yang akan terlibat dalam DOB. Selain itu perbaiki infrastruktur di enam kecamatan yang termasuk sarana pendukung lainnya dalam Wilayah CDOB Kota Cikampek.

Referensi :

- Sugiyono, 2011, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
_____, 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
www.Pikiranrakyat.com
www.Okezone.com
www.Tribunnews.com
www.Sindonews.com
www.Bapennas.go.id
www.Kompas.com
www.Dedicated.blogspot.com
www.Harianjawabarat.com
www.Beritasatu.com
www.Jabarnews.com
www.Newsdetik.com
www.Radarkarawang.com
www.Tvberita.com